



RENCANA KERJA (RENJA) BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN ANGGARAN 2024



Disusun oleh :

Tim Penyusun Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir
Tahun 2024

Alamat Sekretariat Tim : Jl. Hang Tuah No. 04 Tembilahan Kota, Telp. (0768) 21024 – Fax. (0768) 24001

E-mail : perencanaanbapendainhil@gmail.com

(Sub.Koordinator Sub Stansi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, Sekretariat Bapenda Kab. Inhil)

Kata Pengantar

Dengan memanjatkan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga tersusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dengan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2024.

Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir ini disusun sesuai dengan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2026, diharapkan dapat memandu pelaksanaan tugas dan fungsi serta meningkatkan kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Sebagai penunjang pencapaian kinerja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir melaksanakan 2 (dua) program, 8 (delapan) kegiatan dan 35 (tiga puluh lima) Sub Kegiatan dengan rencana dukungan dana APBD T.A. 2024 sebesar Rp **17.545.343.000,-** (Tujuh belas milyar lima ratus empat puluh lima juta tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah).

Demikian Rencana Kinerja Tahunan ini dibuat dan dijadikan pedoman dalam peningkatan kinerja aparatur dimasa mendatang.

Tembilahan, Juli 2023

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,**



FADILLAH, S.Pi, MT

Pembina Utama Muda

Nip. 1991103 199803 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4.Sistimatika.	5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA-PD TAHUN LALU	10
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja-PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	10
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	17
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir	22
2.4 Rivew Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	24
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	34
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	35
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	35
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	36
3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	35
IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	38
V PENUTUP	50

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2022	11
Tabel 2.2.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.	18
Tabel 2.3.	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.....	27
Tabel 2.4.	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 ..	34
Tabel 3.1.	Tujuan dan Sasaran Badan Pendapatan Daerah Tahun 2023	36
Tabel 4.1.	Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025 ..	39

DAFTAR GRAFIK

Grafik.1	Grafik 1. Capaian Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	21
----------	---	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan salah satu tahapan dari perencanaan Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2024 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2026. Program dan Kegiatan yang ada di Renja OPD harus tercantum dalam Renstra OPD yang selanjutnya menjadi dasar/pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024.

Penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dimulai dengan usulan Sub Kegiatan yang diajukan oleh masing-masing Kasubbag/Kasubbid pada Sekretariat, Bidang Pajak Daerah 1, Bidang Pajak Daerah 2, Bidang Pengendalian Pajak Daerah dan Bidang Perencanaan Pengembangan, Hukum dan Kerjasama dan Pembukuan Pendapatan Daerah tahun 2024.

Kemudian usulan kegiatan tersebut dibawa/dibahas dalam rapat Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dirangkum menjadi Rancangan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, disepakati dan diolah serta diajukan ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir untuk pembahasan dan kesepakatan dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Indragiri Hilir melalui Forum Konsultasi Publik dan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah. Hasil pembahasan dan kesepakatan dengan Tim Anggaran tersebut untuk selanjutnya menjadi Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Organisasi Perangkat Daerah

(OPD) diwajibkan menyusun Rencana Kerja Tahunan (Renja OPD) sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) OPD. Rencana Strategis (Renstra) merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program, sedangkan Renstra dijabarkan lebih lanjut kedalam perencanaan tahunan yaitu Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Sebagaimana lampiran I Surat Edaran Bupati Indragiri Hilir Nomor 050/Bappeda-REN/025.1 tanggal 9 Januari 2023 tentang Pedoman penyusunan Rancangan Rencana kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2024, untuk rancangan awal Renja Perangkat daerah mencakup analisis gambaran pelayanan perangkat daerah dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2024.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja-PD Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024 diantaranya adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid Virus Disease 2019 (COVID-19) dan /atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. UU Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Pengganti UU Nomor 28 Tahun 2009) Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2005-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2008 Nomor 26);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023
15. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 69 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja-PD Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir adalah sebagai pedoman dan arah di dalam pelaksanaan program/kegiatan tahun 2024 bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Adapun tujuan dibuatnya Renja-PD Badan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir ini adalah :

1. Sebagai pengendali kegiatan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir agar terarah dan sesuai dengan Kebijakan dan Program yang telah ditetapkan;
2. Tercapainya sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan perencanaan;
3. Terwujudnya pelaksanaan kegiatan sesuai dengan arah yang terpadu dengan strategi yang tepat dan terukur;
4. Sebagai pedoman penyusunan kegiatan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir
5. Sebagai dasar dalam mengevaluasi kinerja kegiatan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Dengan demikian dokumen Renja-PD Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024 sebagai pedoman dan arah didalam menyusun anggaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dan sebagai dasar penentuan KUA dan PPAS, RKA tahun 2024 oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

1.4. Sistematika Renja-PD

Sistematika penulisan Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024 adalah:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Memuat Pengertian Renja-PD, serta proses penyusunan Renja-PD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOPD, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Menjelaskan maksud dan tujuan dari disusunnya Renja-PD.

1.4. Sistematika Renja-PD

Mengemukakan sistematika Renja-PD terkait dengan pengaturan serta penjelasan ringkas isi dari setiap BAB.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA-PD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Bab ini memuat kajian (review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja-PD Badan Pendapatan daerah tahun lalu (tahun n-2/2022) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1/2025), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja-PD sudah disahkan.

Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra-PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja-PD tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja-PD tahun lalu, dan realisasi Renstra-PD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan perangkat daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra-PD; dan
6. Kebijakan/ tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Adapun table yang perlu disajikan adalah Tabel 2.1, 2.2, 2.3

2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing perangkat Daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolak ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap Perangkat Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolak ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta normal dan standar pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah, yang disesuaikan menurut Perangkat Daerah masing-masing, Tabel 2.4.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Berisikan uraian mengenai :

1. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
Khusus provinsi, uraikan mengenai koordinasi dan sinergi program antara Perangkat Daerah provinsi dengan Perangkat Daerah Kabupaten/kota serta dengan kementrian dan lembaga di tingkat pusat dalam rangka pencaian kinerja pembangunan;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSKP, SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai :

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terhadap rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda;

Adapun Tabel yang akan disajikan sebagaimana format tabel 2.5.

2.5. Penelaahan Usulan program dan Kegiatan Masyarakat

Berisikan uraian mengenai :

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait

langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditunjukkan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbag ini, antara lain:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Sajikan Tabel 2.6

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah. Tabel 3.1.

3.3. Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

Misal :

- Pencapaian visi dan misi kepala daerah,
- Pencapaian SDGs,
- Pengentasan kemiskinan,
- Pencapaian NSKP dan SPM
- Pendayagunaan potensi ekonomi daerah,
- Pengembangan daerah terisolir,
- Dsb.

- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi :
- Jumlah program dan jumlah kegiatan.
 - Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
 - Total kebutuhan dana/pagu indikator yang dirinci menurut sumber pendanaannya.
- c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.
- d. Tabel Rumusan Rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan Tabel 3.2

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Tabel yang disajikan : Tabel 4.1

BAB V. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa :

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan Kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

BAB II

EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja-PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra-PD

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah suatu OPD adalah Penjabaran Perencanaan tahunan dari Renstra OPD. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan. Laporan Kinerja adalah Iktisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri dapat dijelaskan sebagai keluaran/ hasil dari kegiatan/ program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Untuk mengukur kinerja itu sendiri diperlukan indikator kinerja yang merupakan alat ukur untuk pencapaian suatu kebijakan/ program/ kegiatan dan sekaligus merupakan alat ukur untuk mengevaluasi dan menilai kinerja sebuah entitas.

Sedangkan laporan keuangan merupakan laporan pertanggung jawaban keuangan yang berbentuk laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Ketentuan mengenai bentuk laporan keuangan tersebut telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005. SAP dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), dilengkapi dengan Pengantar Standar Akuntansi Pemerintahan dan disusun mengacu kepada Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan.

Evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Daerah tahun 2022, berdasarkan realisasi target kinerja keluaran dari kegiatan yang dilaksanakan, serta capaian dari target program/kegiatan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Daerah, adapun tabel evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 2.1.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2022
Kabupaten Indragiri Hilir

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (renja-PD tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
						Target Renja PD Tahun (2022)	Realisasi Renja PD Tahun (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11(6+8+10)	12 (11/5)
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN										
5 2	KEUANGAN										
5 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	CAKUPAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH YANG TERPENUHI	Persen	100	96	92	92	100	100	100	100
5 02 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rata-rata nilai aspek perencanaan kinerja dan Pelaporan Kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	Nilai	22	24	22	-	109	22	22	100
5 02 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan perangkat Daerah	Dokumen	12	2	2	2	100	2	6	50
5 02 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	15	5	7	7	100	5	17	113
5 02 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100	100		
5 02 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	68	90	63	63	100	71	224	100
5 02 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang berkinerja baik	Persen	100	50	90	90	100	100		
5 02 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Paket	197	74	45	45	100	63	182	92
5 02 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang/Bulan	38	-	3	2	75	10	12	32
5 02 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik	Persen	100	83	100	100	100	100		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (renja-PD tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
						Target Renja PD Tahun (2022)	Realisasi Renja PD Tahun (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11(6+8+10)	12 (11/5)
5 02 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	3	1	1	1	100	1	3	100
5 02 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	26	11	11	11	100	14	36	138
5 02 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	Paket	6	2	2	2	100	2	6	100
5 02 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan Yang Disediakan	Paket	9	3	3	3	100	3	9	100
5 02 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang disediakan	Dokumen	26	6	6	6	100	6	18	69
5 02 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	920	144	316	316	100	297	757	82
5 02 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran	Persen	100	-	100	100	100	93		
5 02 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	Unit	10	-	3	3	100	2	5	50
5 02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran	Persen	100	89	100	100	100	93		
5 02 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	3	1	1	1	100	1	3	100
5 02 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik yang disediakan	Laporan	36	12	12	12	100	12	36	100
5 02 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	3	1	1	1	100	1	3	100
5 02 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran	Persen	100	100	100	100	100	93		
5 02 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	124	38	38	38	100	40	116	94
5 02 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	142	45	45	45	100	50	140	99

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (renja-PD tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
						Target Renja PD Tahun (2022)	Realisasi Renja PD Tahun (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11(6+8+10)	12 (11/5)
5 02 01 2.09 09	Pemeliharaan/Reh abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Unit	6	13	3	3	100	1	17	283
5 02 01 2.09 01	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor ata Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	6	3	3	3	100	3	9	150
5 02 04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase PAD terhadap pendapatan Daerah	Persen	9	11	10,02	9,16	91,42	10,02	10,00	100
5 02 04 2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap pendapatan Daerah	Persen	9	11	10,02	9,16	91,42	10,02	10,00	100
5 02 04 2.01 01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan pajak Daerah	Dokumen	3	-	-	-	-	1	1	33
5 02 04 2.01 02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah dokumen hasil analisis pajak daerah serta Terlaksananya pengembangan pajak daerah dan kebijakan pajak daerah	Dokumen	3	2	6	12	200	1	15	500
5 02 04 2.01 03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah	Laporan	6	3	2	2	100	1	6	100
5 02 04 2.01 04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	Unit	3	2	1	1	100	1	4	133
5 02 04 2.01 05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah, subjek pajak daerah dan wajib pajak daerah	Laporan	36	24	12	12	100	12	48	133
5 02 04 2.01 06	Pengelolaan, Pemeliharaan dan Pelaporan Data Basis Pajak Daerah	Jumlah laporan hasil pengelolaan, pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak daerah	Laporan	3	-	-	-	-	1	1	33
5 02 04 2.01 07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah objek pajak yang disesuaikan NJOP nya	Objek Pajak	33.100	6.697	4.550	6.184	136	10.000	22.881	69
5 02 04 2.01 08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah dokumen penetapan pajak daerah	Dokumen	488.000	138.665	145.000	142.115	98	160.000	440.780	90
5 02 04 2.01 09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah layanan dan konsultasi pajak daerah	Layanan	9.600	3.000	3.070	3.070	100	3.000	9.070	94
5 02 04 2.01 10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah data pelaporan pajak daerah yang telah dilakukan penelitian dan verifikasi	Dokumen	38	12	12	13	108	12	37	97

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (renja-PD tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
						Target Renja PD Tahun (2022)	Realisasi Renja PD Tahun (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11(6+8+10)	12 (11/5)
5 02 04 2.01 11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penagihan pajak daerah	Dokumen	111.250	27.340	35.400	35.400	100	36.175	98.915	89
5 02 04 2.01 12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil penyelesaian keberatan pajak daerah	Dokumen	4.780	733	1.500	6.000	400	1.300	8.033	168
5 02 04 2.01 13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan pajak daerah	Dokumen	850	150	195	195	90	230	575	68
5 02 04 2.01 14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah	Laporan	6	-	2	2	100	2	4	67
5 02 04 2.01 15	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Laporan	3	-	-	-	-	2	2	67

Pelaksanaan Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir 2022 sebagian besar terlaksana sesuai yang diharapkan, dengan capaian total secara umum capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program dan kegiatan yakni realisasi Fisik 94.108 % dan realisasi anggaran sebesar 80.65%. Pada tahun 2022 Badan Pendapatan Daerah melaksanakan 2 Program dan 8 kegiatan dan 31 Sub Kegiatan. Beberapa Sub Kegiatan kegiatan yang capaian kinerja tidak sesuai dengan target antara lain adalah sbb :

1) Sub Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Fisik = 74,53 %, keuangan = 47,16 %)

Permasalahan : Dari target 3 orang, hanya 2 orang yang dapat mengikuti Bintek, hal ini disebabkan jadwal yang telah ditetapkan untuk peserta mengikuti Bintek, berbenturan dengan kegiatan lain yang lebih prioritas, sehingga peserta tersebut batal mengikuti bintek, sedangkan waktu tidak memungkinkan lagi untuk menggani peserta

Solusi : Pada tahun 2023, jadwal bintek disusun sejak awal dengan memperhatikan jadwal kegiatan lain agar tidak terjadi benturan

2) Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Fisik = 60 %, dan keuangan = 43 %)

Permasalahan : Langgana koran hanya dapat diberikan selama 6 bulan, terhadap sebagian yang telah mengajukan pemohon berlangganan

Solusi : PPTK memperhitungkan secara cermat jumlah, jenis dan waktu berlangganan koran.

3) Sub Kegiatan : Pendataan dan Pendaftaran Objek pajak (Fisik = 75 %, dan keuangan = 67,92 %)

Permasalahan : dari 162 kali Perjalan Dinas dalam rangka pendataan Objek pajak hanya terlaksana 141 kali, hal ini disebabkan penyusunan schedul turun kelapangan antara beberapa kegiatan terjadi bentrok, disebabkan terbatasnya SDM pada bidang tersebut.

Solusi : Untuk masa yang akan datang akan dilakukan penyusunan jadwal secara lebih terperinci dan terkoordinasi.

4) Sub Kegiatan : Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah (Fisk = 92,33 %, dan keuangan sebsar = 71,50 %),

Permasalahan : Sebagian anggaran pada kegiatan ini merupakan anggaran perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan pelayanan dan konsultasi pajak, dan pemungutan pajak daerah di seluruh kecamatan untuk jenis pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, sarang burung walet. Sisa anggaran hampir 28,50 %, merupakan sisa biaya hotel, hal ini disebabkan hampir sebagian besar kecamatan tidak memiliki hotel. Demikian juga terhadap

perjalanan luar daerah baik pekanbaru maupun propinsi lain untuk melakukan konsultasi tentang pajak daerah, terdapat sisa hotel yang cukup besar.

Solusi : Anggaran untuk hotel agar disesuaikan dengan kondisi riil di lapangan.

5) Sub Kegiatan : Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), (Fisk = 57,28 %, dan keuangan sebsar = 46.30 %),

Permasalahan : 1. Belanja Jasa Layanan Umum Tahun Anggaran 2022 yaitu Pembayaran Honorarium/Biaya Validasi Data PBB-P2 kepada Validator yang ditunjuk oleh Lurah/Kepala Desa dengan besaran tarif honor Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) per-lembar Data PBB-P2 yang divalidasi tidak mencapai target adalah karena setelah diinformasikan kepada validator terkait adanya Kegiatan Validasi PBB-P2, dimana Bapenda melakukan permintaan Data PBB-P2 yang harus divalidasi kepada validator dan dalam prosesnya terus dilakukan komunikasi, koordinasi dan permintaan data tersebut hingga batas waktu yang ditentukan, validator hanya dapat memberikan data sebanyak 7.432, dari target yang ditetapkan sebanyak 19.344 lembar, dengan berbagai kondisi permasalahan di lapangan.

2. Belanja Perjalanan Dinas Biasa Tahun Anggaran 2022 hanya mencapai 50% dikarenakan perencanaan jadwal Perjalanan Dinas pada saat itu difokuskan pada Kegiatan Penetapan Wajib Pajak Daerah, sehingga Perjalanan Dinas pada Kegiatan Penilaian PBB-P2 serta BPHTB tidak dapat dilaksanakan dengan maksimal. Hal ini salah satunya yang mempengaruhi hasil Validasi Data PBB-P2 tidak dapat memenuhi target.

Solusi : Angka realisasi ini tentunya menjadi evaluasi bagi pelaksanaan kegiatan dimasa yang akan datang. Kedepan, perencanaan jadwal perjalanan dinas akan disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan sub bidang masing-masing, sehingga tiap sub bidang dapat melaksanakan tugas dan mencapai targetnya dengan maksimal

6) Sub Kegiatan : Penetapan Wajib Pajak Daerah (Fisik = 68,38 %, dan keuangan = 67,97 %)

Permasalahan : Honorarium sebagian besar kolektor PBB-P2 tidak dapat dibayarkan secara penuh, honor tersbut dibayarkan sesuai dengan capaian realisasi, dan sebagian besar kolektor realisasinya tidak sesuai target sehingga terdapat sisa anggaran honor kolektor yang cukup besar. Sebagai informasi bahwa Pada tahun 2022 jumlah SPPT PBB-P2 yang dicetak berjumlah 142.115 dokumen, jumlah SPPT yang kembali dan dibayarkan berjumlah 52.445 SPPT (37

%). Penyampaian SPPT dan pemungutan pajak PBB-P2 inilah yang menjadi tugas kolektor dan honorinya dibayarkan berdasarkan realisasinya.

Solusi : Melakukan filter data PBB-PB yang akan dilakukan penetapan dengan lebih cermat dan selektif

7) Sub Kegiatan : Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah (fisik = 71,89, keuangan 33,83)

Permasalahan : Realisasi belanja publikasi berupa pembuatan video informasi tentang perpajakan tidak sesuai dengan rencana awal, dari anggaran yang tersedia 20.000.000 hanya dimanfaatkan 1.500.000, karena video yang dibuat bentuknya cukup sederhana agar lebih mudah dimengerti wajib pajak dan durasinya juga pendek.

Solusi : Pembuatan video selanjutnya akan melibatkan pihak ketiga yang memiliki pengalaman dalam bidangnya.

Implikasi yang timbul terhadap capaian Renstra Perangkat Daerah antara lain adalah :

- Kontribusi Pajak dari terhadap Pendapatan Asli Daerah masih kurang optimal.

Langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi permasalahan di atas antara lain :

- Memperbaiki data wajib pajak daerah secara menyeluruh
- Melengkapi sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan optimalisasi pendapatan dari pajak daerah
- Meningkatkan kemampuan aparatur pajak daerah melalui pelatihan di bidang perpajakan

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pelaksanaan program kegiatan dan Sub Kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir sebagian besar dapat memenuhi target output pada tahun berkenaan. Jika dikaitkan dengan pencapaian indikator pencapaian renstra, kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir secara detail dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Indragiri Hilir

No	Indikator	Satuan	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi Capaian		Catatan Analisis
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun** 2023	Tahun*** 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)				(7)		(8)		
1	CAKUPAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH YANG TERPENUHI	Persen			100	92	93	100	100	92	100	100	Sesuai target
1	Rata-rata nilai aspek perencanaan Kinerja dan Pelaporan Kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	Persen			22	22	24	24	24	-	24	24	Belum Dinilai
1.1	Jumlah Dokumen Perencanaan perangkat Daerah	Dokumen			2	2	2	2	2	2	2	2	Sesuai target
1.2	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan			5	5	5	5	5	7	5	5	Melebihi target
2	Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar	Persen			100	92	93	100	100	100	93	100	Melebihi target
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan			90	90	74	74	90	63	74	74	Dibawah target
3	Persentase aparatur yang berkinerja baik	Persen			100	92	100	100	100	90	100	100	Dibawah Target
3.1	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Paket			74	45	74	74	74	45	63	74	Sesuai target
3.2	jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang			3	2	3	3	3	2	3	3	Sesuai target
4	Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik	Persen			100	92	93	100	100	100	93	100	Melebihi Target
4.1	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket			17	1	1	1	17	1	1	1	Sesuai target
4.2	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket			81	6	6	6	81	11	6	6	Melebihi Target
4.3	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	Paket			2	2	2	2	2	2	2	2	Sesuai target
4.4	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan Yang Disediakan	Paket			3	3	3	3	3	3	3	3	Sesuai target
4.5	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Dokumen			6	6	6	6	6	6	6	6	Sesuai target
4.6	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan			167	304	305	305	167	316	305	305	Melebihi target

No	Indikator	Satuan	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi Capaian		Catatan Analisis
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun** 2023	Tahun*** 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)				(7)				(8)
5	Cakupan Ketersediaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen			-	100	100	100	-	100	100	100	Sesuai target
5.1	Jumlah Unit Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	Unit				2	2	2		3	2	2	Melebihi target
6	Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran	Persen			100	92	93	100	100	100	93	100	Melebihi Target
6.1	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan			1	1	1	1	1	1	1	1	Sesuai target
6.2	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik yang disediakan	Laporan			12	12	12	12	12	12	12	12	Sesuai target
6.3	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan			1	1	1	1	1	1	1	1	Sesuai target
7	Cakupan Ketersediaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen				92	93	93		100	93	93	Melebihi Target
7.1	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit			38	38	40	40	38	38	40	40	Sesuai target
7.2	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit			45	45	50	50	45	45	50	50	Sesuai target
7.3	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit			13	2	2	2	13	3	2	2	Melebihi Target
7.4	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit			3	3	3	3	3	3	3	3	Sesuai target
II	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persen			9,29	9,5	10,02	10,0	9,29	9,16	10,02	8,0	Dibawah target
1	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persen			9,29	9,5	10,02	10,0	9,29	9,16	10,02	8,0	Dibawah target
1.1	Jumlah dokumen rencana pengelolaan pajak daerah	Dokumen			-	1	1	1	-	-	1	1	Dibawah target
1.2	Jumlah dokumen hasil analisis pajak daerah serta terlaksananya pengembangan pajak daerah dan kebijakan pajak daerah	Dokumen			2	1	1	1	2	12	1	1	Melebihi Target
1.3	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah	Laporan			3	2	1	1	3	2	1	1	Sesuai target
1.4	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	Unit			2	1	1	1	2	1	1	1	Sesuai target
1.5	Jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah, subjek pajak daerah dan wajib pajak daerah	Laporan			24	12	12	12	24	12	12	12	Sesuai target

No	Indikator	Satuan	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi Capaian		Catatan Analisis
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun** 2023	Tahun*** 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)				(7)				(8)
1.6	Jumlah laporan hasil pengolahan, pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak daerah	Laporan			-	1	1	1	-	-	1	1	Dibawah target
1.7	Jumlah objek pajak yang disesuaikan NJOP nya	Objek Pajak			17.185	5.000	10.000	15.000	17.185	6.184	10.000	15.000	Melebihi Target
1.8	Jumlah dokumen ketetapan pajak daerah	Dokumen			53.060	145.000	160.000	160.000	53.060	142.115	160.000	160.000	Dibawah target
1.9	Jumlah layanan dan konsultasi pajak daerah	Layanan			3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.070	3.000	3.000	Melebihi Target
1.10	Jumlah datapelaporan pajak daerah yang telah dilakukan penelitian dan verifikasi	Dokumen			12	12	12	12	12	13	12	12	Melebihi Target
1.11	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penagihan pajak daerah	Dokumen			27.340	35.400	36.175	37.000	27.340	35.400	36.175	37.000	Sesuai target
1.12	Jumlah dokumen hasil penyelesaian keberatan pajak daerah	Dokumen			950	1.150	1.300	1.350	950	6.000	1.300	1.350	Melebihi Target
1.13	Jumlah dokumen hasil pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan pajak daerah	Dokumen			150	215	230	250	150	195	230	250	Dibawah Target
1.14	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah	Laporan			-	2	2	2	-	2	2	2	Sesuai target

Dari tabel dapat dilihat bahwa, sebagian besar Sarsaran Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tahun 2022 dapat dicapai sesuai dengan target. Dengan rincian Sbb :

Indikator Program :

- Terdapat 1 dari 2 Indikator Program sesuai Target = 50 %
- Terdapat 1 dari 2 Indikator Program dibawah target = 50 %

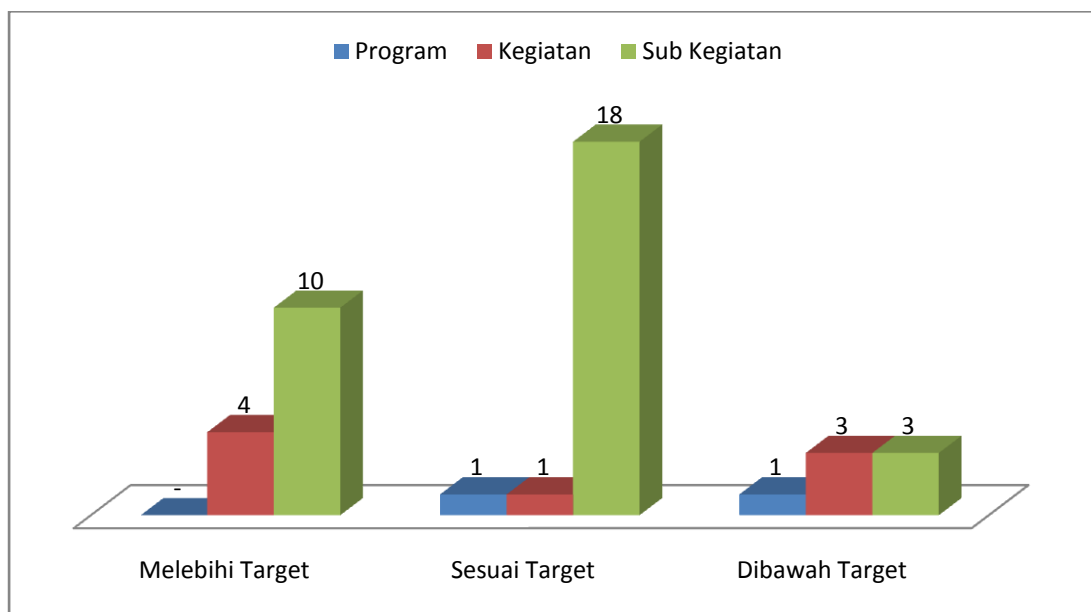
Indiokator Kegiatan :

- Terdapat 1 Kegiatan dari 8 Kegiatan yang sesuai target = 13,5 %
- Terdapat 4 dari 8 Kegiatan yang melebihi target = 50 %
- Terdapat 3 dari 8 Kegiatan yang dibawah target = 37,50 %

Indikator Sub Kegiatan :

- Terdapat 18 dari 31 Sub Kegiatan sesuai target = 58,06 %
- Terdapat 10 dari 31 Sub Kegiatan yang melebihi target = 32,36 %
- Terdapat 3 dari 31 Sub Kegiatan yang Dibawah Target = 9,68 %

Grafik 1. Capaian Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan



Dari grafik terlihat bahwa sebagian besar Indikator Sub Kegiatan dapat dicapai sesuai target = 58, 06 %, Diatas Target= 32,36 %, dan hanya 9,68 % dibawah target.

Tingkat capaian kinerja ini terkait erat dengan dukungan terhadap pencapaian visi misi Bupati Indragiri Hilir, program, kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Pendapatan Daerah adalah mendukung pencapaian misi pertama, Meningkatkan tatakelola pemerintahan yang bersih dan baik (*good governance*) dengan menerapkan pemerintahan daerah yang amanah dan akuntabel dengan dukungan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pembangunan.

Dalam pencapaian misi pertama, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir menyadari bahwa tuntutan masyarakat terhadap mutu pelayanan umum dan peningkatan pembangunan dari waktu ke waktu semakin meningkat, maka peranan Badan Pendapatan Daerah sebagai koordinator pendapatan sangat menentukan. Oleh sebab itu diperlukan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah secara profesional, transparan dan akuntabel dalam upaya membangun masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir yang taat pajak dan retribusi daerah. Dalam upaya peningkatan pembangunan daerah, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir secara dinamis terus melakukan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi serta berkoordinasi dalam memperjuangkan optimalisasi penerimaan dan pendapatan daerah.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD Berdasarkan hasil evaluasi kinerja pelayanan Perangkat Daerah

Badan Pendapatan Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan sebagian tugas Kepala Daerah dalam bidang Keuangan Daerah yaitu Pengelolaan Pendapatan dan Retribusi Daerah. Pelaksanaan Tugas dan fungsi badan Pendapatan Daerah berdasarkan :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
- b. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 69 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Badan Pendapatan Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan lingkup bidang pengelolaan pendapatan daerah/pengelolaan pajak dan retribusi daerah yang menjadi kewenangan daerah

Tingkat Kinerja Pelayanan Pengelolaan Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah relatif berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dimana Daerah hanya diberi wewenang terhadap 11 jenis pajak daerah antara lain : PBB-P2, BPHTB, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, pajak Penerangan Jalan, Pajak reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Minerba, Pajak Sarang Burung Walet dan Pajak parkir.

Hal-hal kritis yang menjadi isu penting dalam pelaksanaan tugas pokok Badan Pendapatan Daerah adalah masih tingginya tunggakan Piutang Pajak Daerah dimana sampai tahun 2022. Angka tunggakan piutang pajak daerah mencapai 124 Milyar Rupiah.

Gambaran isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir diantaranya adalah :

1. Masih rendahnya akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kab. Inhil
2. Pendapatan Asli daerah dari sektor Pajak daerah masih belum optimal
3. Potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah belum terdata dan tergali secara optimal
4. Masih banyak wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya dengan tepat waktu.
5. Informasi tentang Kebijakan Pajak Daerah belum tersebar luas dengan baik

Dampak yang akan dirasakan terhadap pencapaian tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah adalah meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dari Dari Sektor Pajak Daerah, yang merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah.

Terkait ***Sustainable Development Goals (SDGs)*** Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir ikut mensukseskan salah satu agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yaitu Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim. Salah satunya yaitu dengan memanfaatkan teknologi informasi sehingga pembayaran pajak dapat dilakukan secara online, melalui program ini diharapkan dapat mengurangi penggunaan kertas dalam transaksi pajak daerah.

Tantangan yang dihadapi Badan Pendapatan Daerah dalam meningkatkan pelayanan di Bidang Pajak Daerah adalah : masih rendahnya kesadaran wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak secara tepat waktu.

Masih banyak peluang di bidang perpajakan yang belum tergali dengan baik oleh Daerah seperti seperti Pajak PBB-P2 , dimana potensi pajaknya cukup tinggi, akan tetapi belum terdata dengan baik sehingga potensi pajak PBB-P2 belum tergali secara maksimal.

Hal-hal strategis yang perlu dilakukan dalam menghadapi tantangan dan peluang terhadap pelayanan di bidang Pajak Daerah antara lain adalah :

- Melakukan inventarisasi data secara menyeluruh terhadap potensi Pajak Daerah terutama PBB-P2
- Melakukan sosialisasi secara berkala dan terus menerus kepada wajib pajak akan pentingnya memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak secara tepat waktu
- Memberikan penghargaan(*Reward*) bagi wajib pajak yang rajin melunasi kewajiban pajaknya serara rutin dan memberikan sanksi/hukuman bagi wajib pajak yang secara terus menerus tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak Daerah.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tidak terlepas dari berbagai permasalahan dan hambatan yang dihadapi, permasalahan dan hambatan tersebut tersebut antara lain :

1. Rendahnya kesadaran dan atau pemahaman serta kemampuan wajib pajak akan kewajibannya untuk menghitung sendiri, menetapkan, membayar, dan melaporkan pajak terhutangnya;
2. Masih banyaknya data Wajib Pajak yang tidak sesuai kepemilikan dengan yang sebenarnya, baik pada objek pajak maupun subjek pajak;
3. Realisasi target kurang maksimal dan masih besarnya tunggakan pajak daerah;
4. Potensi pajak daerah banyak belum tergali dan terdata secara maksimal;
5. Belum optimalnya budaya kerja aparatur dalam pelayanan kepada Wajib Pajak Daerah;
6. Belum optimalnya budaya kerja aparatur dalam pelayanan kepada Wajib Pajak Daerah

2.4. Review terhadap rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD Tahun 2024 menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah Tahun 2024. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian berdasarkan kebutuhan OPD dan melihat kondisi yang berkembang dalam masyarakat.

Penyusunan ranwal renja berpedoman pada renstra perangkat daerah. Hal ini untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam ranwal renja PD dengan renstra PD.

Forum PD/lintas PD merupakan salah satu tahapan dalam penyusunan renja PD, dilaksanakan oleh kepala PD berkoordinasi dengan Bappeda. Forum PD/lintas PD dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi PD. Pembahasan dengan pemangku kepentingan bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam rancangan renja PD.

Hasil pembahasan rancangan renja PD dalam forum PD/lintas PD dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri forum PD/lintas PD.

Penyusunan ranwal renja juga berpedoman pada hasil evaluasi hasil renja tahun lalu dan hasil evaluasi hasil renja tahun berjalan. Hal ini untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan atau kegiatan baru yang disusun dalam ranwal renja dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran renstra. Penyusunan ranwal renja PD mencakup analisis gambaran pelayanan PD dan hasil evaluasi renja tahun lalu.

Hasil perumusan ranwal renja disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat pendahuluan, hasil evaluasi renja PD tahun lalu, tujuan dan sasaran PD, renja dan pendanaan PD dan penutup.

Tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah merupakan ketentuan yang harus diikuti sesuai dengan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Dalam rangka meningkatkan kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir untuk pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan pada masyarakat Wajib Pajak Daerah, diperlukan aparatur yang sehat, cerdas, terampil, bertanggung jawab, inovatif dan kapabel. Artinya bahwa aparatur yang ada harus mampu mengimplementasikan tugas dan fungsinya masing-masing dalam kerangka peningkatan prinsip-prinsip *clean government* dan *good governance*.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir merupakan salah satu OPD yang berperan strategis dalam konstelasi pembangunan daerah yang ikut mendukung keberhasilan program kegiatan pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, dengan membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan atas program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2024, maka hasil review terhadap rancangan awal RKPD dapat dijelaskan dalam tabel Tabel 2.3 sebagai berikut :

Tabel 2.3.
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir

No	Rancangan Awal RKPD					Rancangan Awal RKPD					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	100 %	13.046.936.000	1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Indragiri Hilir	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	100 %	13.046.936.000	
2	1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Indragiri Hilir	Rata-rata nilai aspek perencanaan Kinerja dan Pelaporan Kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	13 Nilai	218.431.609	1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Indragiri Hilir	Rata-rata nilai aspek perencanaan Kinerja dan Pelaporan Kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	13 Nilai	218.431.609	
3	1.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Indragiri Hilir	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	169.000.000	1.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Indragiri Hilir	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	169.000.000	
4	1.1.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Indragiri Hilir	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	49.431.609	1.1.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Indragiri Hilir	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	49.431.609	
5	1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Indragiri Hilir	Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar	100 persen	8.351.946.141	1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Indragiri Hilir	Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar	100 persen	8.351.946.141	
6	1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Indragiri Hilir	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	63 Orang/bulan	8.287.230.141	1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Indragiri Hilir	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	63 Orang/bulan	8.287.230.141	

No	Rancangan Awal RKPD					Rancangan Awal RKPD					Catatan Penting		
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
7	1.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Indragiri Hilir	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	18 Laporan	64.716.000	1.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Indragiri Hilir	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	18 Laporan	64.716.000	
8	1.3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Indragiri Hilir	Persentase aparatur yang berkinerja baik	100 persen	191.546.864	1.3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Indragiri Hilir	Persentase aparatur yang berkinerja baik	100 persen	191.546.864	
9	1.3.1.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Indragiri Hilir	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	63 Paket	64.870.864	1.3.1.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Indragiri Hilir	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	63 Paket	64.870.864	
10		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Indragiri Hilir	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	11 Orang	126.676.000		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Indragiri Hilir	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	11 Orang	126.676.000	
11	1.4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Indragiri Hilir	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	2.004.163.831	1.4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Indragiri Hilir	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	2.004.163.831	
12	1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Indragiri Hilir	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	30.490.500	1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Indragiri Hilir	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	30.490.500	
13	1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Kab. Indragiri Hilir	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Paket	565.867.831	1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Kab. Indragiri Hilir	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Paket	565.867.831	
14	1.4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Indragiri Hilir	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	165.562.500	1.4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Indragiri Hilir	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	165.562.500	

No	Rancangan Awal RKPD					Rancangan Awal RKPD					Catatan Penting		
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
15	1.4.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Indragiri Hilir	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	329.670.000	1.4.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Indragiri Hilir	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	329.670.000	
16	1.4.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Indragiri Hilir	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6 Dokumen	10.000.000	1.4.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Indragiri Hilir	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6 Dokumen	10.000.000	
17	1.4.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Indragiri Hilir	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	305 Laporan	902.573.000	1.4.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Indragiri Hilir	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	305 Laporan	902.573.000	
18	1.5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Indragiri Hilir	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	88.468.000	1.5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Indragiri Hilir	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	88.468.000,00	
19	1.5.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Indragiri Hilir	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	88.468.000	1.5.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Indragiri Hilir	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	88.468.000	
20	1.6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Indragiri Hilir	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	1.698.798.675	1.6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Indragiri Hilir	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	1.698.798.675	
21	1.6.1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Indragiri Hilir	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	7.400.000	1.6.1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Indragiri Hilir	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	7.400.000	
22	1.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Indragiri Hilir	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	619.063.260	1.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Indragiri Hilir	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	619.063.260	

No	Rancangan Awal RKPD					Rancangan Awal RKPD					Catatan Penting		
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
23	1.6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Indragiri Hilir	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.072.335.415	1.6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Indragiri Hilir	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.072.335.415	
24	1.7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Indragiri Hilir	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	100 persen	493.580.880	1.7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Indragiri Hilir	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	100 persen	493.580.880	
25	1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Indragiri Hilir	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	40 Unit	158.540.880	1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Indragiri Hilir	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	40 Unit	158.540.880	
26	1.7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Indragiri Hilir	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	45 Unit	75.650.000	1.7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Indragiri Hilir	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	45 Unit	75.650.000	
27	1.7.3	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Indragiri Hilir	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	174.600.000	1.7.3	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Indragiri Hilir	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	174.600.000	
28	1.7.4	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Indragiri Hilir	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	84.790.000	1.7.4	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Indragiri Hilir	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	84.790.000	
29	2.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		Tingkat Pertumbuhan Pajak Daerah	2 %	4.498.407.000	2.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		Tingkat Pertumbuhan Pajak Daerah	2 %	4.498.407.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Rancangan Awal RKPD					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	2.1 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kab. Indragiri Hilir	- Cakupan Penunjang Peningkatan Pajak dan Retribusi Daerah - Tingkat Pemenuhan Kepatuhan Wajib Pajak Daerah Terhadap Penyelesaian Piutang Pajak - Tingkat Pertumbuhan pajak Daerah jenis Official Assesment - Tingkat Pertumbuhan pajak Daerah Jenis Self Assesment	100 Persen 100 Persen 2 Persen 2 Persen	4.498.407.000	2.1 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kab. Indragiri Hilir	- Cakupan Penunjang Peningkatan Pajak dan Retribusi Daerah - Tingkat Pemenuhan Kepatuhan Wajib Pajak Daerah Terhadap Penyelesaian Piutang Pajak - Tingkat Pertumbuhan pajak Daerah jenis Official Assesment - Tingkat Pertumbuhan pajak Daerah Jenis Self Assesment	100 Persen 100 Persen 2 Persen 2 Persen	4.498.407.000	
31	2.1.1 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Kab. Indragiri Hilir	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Dokumen	55.240.000	2.1.1 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Kab. Indragiri Hilir	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Dokumen	55.240.000	
32	2.1.2 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Kab. Indragiri Hilir	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1 Dokumen	406.417.000	2.1.2 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Kab. Indragiri Hilir	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1 Dokumen	406.417.000	
33	2.1.3 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kab. Indragiri Hilir	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1 Laporan	316.417.000	2.1.3 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kab. Indragiri Hilir	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1 Laporan	316.417.000	
34	2.1.4 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Kab. Indragiri Hilir	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Unit	265.000.000	2.1.4 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Kab. Indragiri Hilir	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Unit	265.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Rancangan Awal RKPD					Catatan Penting		
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
35	2.1.5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Kab. Indragiri Hilir	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	277.235.000	2.1.5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Kab. Indragiri Hilir	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	277.235.000	
36	2.1.6	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Kab. Indragiri Hilir	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1 Laporan	57.610.000	2.1.6	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Kab. Indragiri Hilir	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1 Laporan	57.610.000	
37	2.1.7	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Kab. Indragiri Hilir	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	10100 Obyek Pajak	559.999.850	2.1.7	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Kab. Indragiri Hilir	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	10100 Obyek Pajak	559.999.850	
38	2.1.8	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Kab. Indragiri Hilir	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	161500 Dokumen	671.000.000	2.1.8	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Kab. Indragiri Hilir	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	161500 Dokumen	671.000.000	
39	2.1.9	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Kab. Indragiri Hilir	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	3100 Layanan	579.000.000	2.1.9	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Kab. Indragiri Hilir	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	3100 Layanan	579.000.000	
40	2.1.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Kab. Indragiri Hilir	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	12 Dokumen	233.000.000	2.1.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Kab. Indragiri Hilir	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	12 Dokumen	233.000.000	
41	2.1.11	Penagihan Pajak Daerah	Kab. Indragiri Hilir	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	36550 Dokumen	175.266.100	2.1.11	Penagihan Pajak Daerah	Kab. Indragiri Hilir	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	36550 Dokumen	175.266.100	
42	2.1.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Kab. Indragiri Hilir	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	1450 Dokumen	629.162.500	2.1.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Kab. Indragiri Hilir	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	1450 Dokumen	629.162.500	
43	2.1.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Kab. Indragiri Hilir	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	260 Dokumen	155.571.500	2.1.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Kab. Indragiri Hilir	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	260 Dokumen	155.571.500	

No	Rancangan Awal RKPD					Rancangan Awal RKPD					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	2.1.14 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Kab. Indragiri Hilir	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	2 Laporan	65.365.050	2.1.14 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Kab. Indragiri Hilir	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	2 Laporan	65.365.050	
45	2.1.15 Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Kab. Indragiri Hilir	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	1 Laporan	52.123.000	2.1.15 Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Kab. Indragiri Hilir	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	1 Laporan	52.123.000	
J U M L A H					17.545.343.000					17.545.343.000	

2.5. Penelaahan Usulan program dan Kegiatan Masyarakat

Sebagai bagian dari upaya untuk mempromosikan sistem pemerintahan yang akuntabel dan transparan, maka diperlukan partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam sistem, dalam hal ini terutama adalah partisipasi masyarakat pada proses penyusunan perencanaan kerja. Beberapa *stakeholder* yang terlibat dalam memberikan masukan terhadap penyusunan perencanaan antara lain lembaga kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, tokoh masyarakat maupun OPD lainnya.

Rancangan rencana kerja Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir didiskusikan dalam pembahasan Forum OPD tingkat Kabupaten. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan. Adapun usulan program dan Kegiatan dari Para Pemangku kepentingan Tahun 2024 Kabupaten Indragiri Hilir, dapat dilihat pada tabel 2.4 sebagai berikut :

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari para Pemangku Kepentingan tahun 2024
Kabupaten Indragiri Hilir

Nama Prangkat Daerah : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1						
2						
3						
4						
5						

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang mulai dilaksanakan sejak tahun 2001 merupakan peluang bagi Pemerintah Daerah di Indonesia untuk melaksanakan serta membiayai sendiri kemajuan pembangunan di daerahnya masing-masing.

Desentralisasi merupakan peralihan kewenangan dari lingkungan pemerintah pusat (central government) untuk mengatur ke lingkungan pemerintah daerah (local government) untuk mengatur dan mengurus daerahnya berdasarkan kondisi riil yang mengitarinya (Kaloh, 2002). Dalam melaksanakan desentralisasi fiskal, prinsip *money should follow function* merupakan salah satu prinsip yang harus diperhatikan dan dilaksanakan (Bahl, 2000). Artinya setiap penyerahan atau pelimpahan wewenang pemerintahan membawa konsekuensi pada anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan kewenangan tersebut.

Desentralisasi fiskal merupakan salah satu mekanisme transfer dana dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) dalam kaitan dengan kebijakan keuangan negara yaitu untuk mewujudkan ketahanan fiskal yang berkelanjutan (*fiscal sustainability*) dan memberikan stimulus terhadap aktifitas perekonomian masyarakat. Dengan adanya kebijakan desentralisasi fiskal diharapkan akan menciptakan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang sepadan dengan besarnya kewenangan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah otonom.

Desentralisasi fiskal juga merupakan salah satu pilar dalam memelihara kesetabilan kondisi ekonomi nasional karena transfer dana ke daerah akan mendorong aktifitas perekonomian masyarakat di daerah. Desentralisasi fiskal tersebut dikelompokkan menjadi dua, sebagai berikut :

1. Dana Perimbangan keuangan pusat dan daerah, dengan maksud menciptakan keadilan, pemerataan, dan memperkecil kesenjangan fiskal antar daerah. Dana perimbangan itu berasal dari penerimaan dalam negeri yang diperoleh dari pendapatan perpajakan, royalti dan bagi hasil sumber daya alam.
2. Dana yang bersumber dari hutang dalam negeri dan luar negeri yang disalurkan ke daerah (*subsidiary loan*) baik dari hutang bilateral maupun multilateral.

Secara umum tujuan pemerintah pusat melakukan transfer dana kepada pemerintah daerah adalah :

1. Sebagai tindakan nyata untuk mengurangi ketimpangan pembagian anggaran baik vertikal maupun horizontal.
2. Sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi pengeluaran pemerintah dengan menyerahkan sebagian kewenangan di bidang pengelolaan keuangan negara dan agar manfaat yang dihasilkan dapat dinikmati oleh rakyat di daerah

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Penetapan tujuan dilakukan dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2026. Yaitu pada salah satu indikator tujuan dan sasaran OPD Bapenda yaitu Meningkatkan Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah. Dengan rincian sbb :

Tabel 3.1.

Tujuan Dan Sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024

No	Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Target Tahun 2024
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah Daerah	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	Persen	8
1.1	Meningkatnya Pendapatan Daerah dari Sektor Pajak Daerah	Rasio Pajak Daerah Terhadap PAD	Persen	21

3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Untuk mewujudkan pencapaian Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Indragiri Hilir 2024-2026, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir melaksanakan 2 Program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Program Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Program penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota merupakan program yang menyediakan fasilitas-fasilitas penunjang bagi Badan Pendapatan Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran OPD.

Program Pengelolaan Pendapatan Daerah adalah program yang menjadi tugas pokok dan fungsi utama Badan Pendapatan Daerah. Program ini terkait langsung dengan fungsi-fungsi pencapaian target peningkatan pendapatan asli daerah.

Program ini juga mendukung terwujudnya ***Sustainable Development Goals (SDGs)*** yaitu dengan menyediakan teknologi informasi pembayaran pajak daerah melalui sistem on line. Pembayaran pajak secara online ini dapat mengurangi penggunaan kertas, sehingga turut berpartisipasi dalam melestarikan lingkungan hidup.

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024 mencakup 2 dua Program dan 8 (delapan) kegiatan dan 35 (tiga puluh lima) sub kegiatan.

Program pertama adalah program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Program ini lebih banyak terpusat di Kantor Bapenda Indragiri Hilir Kecamatan di Kecamatan Tembilahan. Sedangkan Program kedua adalah Pengelolaan Pendapatan Daerah. Program ini sasarannya tersebar di seluruh Kecamatan se Kabupaten Indragiri Hilir. Masyarakat yang menjadi fokus sasaran adalah masyarakat wajib pajak yang memiliki objek pajak dari 11 Jenis pajak yang menjadi kewenangan daerah.

Pada Rencana Kerja (Renja) Bapenda Tahun 2024, Dana yang dibutuhkan untuk melaksanakan 2 dua Program, 8 (delapan) kegiatan dan 35 (tiga puluh lima) sub kegiatan adalah sebesar RP. 17.545.343.000, yang terdiri dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 13.046.936.000, dan program Pengelolaan Pendapatan Daerah sebesar Rp. 4.498.407.000,-

Pada Rancangan Kerja (Renja) Bapenda Tahun 2024 Seluruh program, kegiatan dan sub. Kegiatan yang disajikan telah sesuai dengan rumusan rancangan awal RKPD Tahun 2024. Rancangan renja Tahun 2024 juga telah sesuai dengan Dokumen renstra 2024-2026 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, Tabel 4.1.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahun 2024 sebagai acuan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran yang berisi program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta pagu indikatif pendanaan, RKPD Tahun 2024.

Mengingat kemampuan keuangan Kabupaten Indragiri Hilir sangat terbatas dalam penganggaran rencana program pembangunan dalam RKPD Tahun 2024 dan Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2024, maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir menetapkan kebijakan penganggaran program dan kegiatan prioritas agar skala dan kebutuhan yang paling diinginkan terakomodir.

Rumusan rencana program dan kegiatan dan Sub Kegiatan OPD Kabupaten Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 secara detail dapat dilihat pada tabel 4.1. berikut :

Tabel 4.1
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pagu Indikatif Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025

Nama Perangkat Daerah : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran		Target	Pagu Indikatif (Rp)
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						BADAN PENDAPATAN DAERAH					17.545.343.000								17.874.387.700	
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					17.545.343.000								17.874.387.700	
	5	02				KEUANGAN					17.545.343.000								17.874.387.700	
1	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	100%			100 %	13.046.936.000						100%	14.383.168.700	
	5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rata-rata nilai aspek perencanaan Kinerja dan Pelaporan Kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	15Nilai			13 Nilai	218.431.609			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penyelenggaraan Pemerintahan Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	ASN Badan Pendapatan Daerah	14Nilai	134.291.000	
	5	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen			4 Dokumen	169.000.000	- Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penyelenggaraan Pemerintahan Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	ASN Badan Pendapatan Daerah	4 Dokumen	102.426.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD														

No	Kode				Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15 Laporan			5 Laporan	49.431.609	- Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penyelenggaraan Pemerintahan Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	ASN Badan Pendapatan Daerah	5 Laporan	31.865.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar	100 persen			100 persen	8.351.946.141			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penyelenggaraan Pemerintahan Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	ASN Badan Pendapatan Daerah	100persen	9.608.729.000	
	5	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	67 Orang/bulan			63 Orang/bulan	8.287.230.141	- Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penyelenggaraan Pemerintahan Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	ASN Badan Pendapatan Daerah	65 Orang/bulan	9.567.001.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5	02	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	54 Laporan			18 Laporan	64.716.000	- Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penyelenggaraan Pemerintahan Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	ASN Badan Pendapatan Daerah	18 Laporan	41.728.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH	

No	Kode				Usuran / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
														Nasional					Daerah
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	54 Laporan			0 Laporan	64.716.000	- Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penyelenggaraan Pemerintahan Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	ASN Badan Pendapatan Daerah	18 Laporan	41.728.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang berkinerja baik	100 persen			100 persen	191.546.864			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penyelenggaraan Pemerintahan Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	ASN Badan Pendapatan Daerah	100persen	204.851.000	
5	02	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	67 Paket			63 Paket	64.870.864	- Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penyelenggaraan Pemerintahan Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	ASN Badan Pendapatan Daerah	65 Paket	53.109.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	42 Orang			11 Orang	126.676.000	- Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penyelenggaraan Pemerintahan Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	ASN Badan Pendapatan Daerah	14 Orang	151.742.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100persen			100 persen	2.004.163.831			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penyelenggaraan Pemerintahan Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	ASN Badan Pendapatan Daerah	100persen	1.369.493.400	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket			1 Paket	30.490.500	- Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penyelenggaraan Pemerintahan Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	ASN Badan Pendapatan Daerah	1 Paket	26.554.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	26 Paket			9 Paket	565.867.831	- Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penyelenggaraan Pemerintahan Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	ASN Badan Pendapatan Daerah	9 Paket	570.000.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket			2 Paket	165.562.500	- Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penyelenggaraan Pemerintahan Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	ASN Badan Pendapatan Daerah	2 Paket	18.019.400	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	9 Paket			3 Paket	329.670.000	- Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penyelenggaraan Pemerintahan Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	ASN Badan Pendapatan Daerah	3 Paket	201.059.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	26 Dokumen			6 Dokumen	10.000.000	- Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penyelenggaraan Pemerintahan Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	ASN Badan Pendapatan Daerah	8 Dokumen	11.380.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	980 Laporan			305 Laporan	902.573.000	- Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penyelenggaraan Pemerintahan Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	ASN Badan Pendapatan Daerah	315 Laporan	542.481.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100persen			100 persen	88.468.000			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penyelenggaraan Pemerintahan Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	ASN Badan Pendapatan Daerah	100persen	834.587.000	
	5	02	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				3 Unit	88.468.000	- Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penyelenggaraan Pemerintahan Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	ASN Badan Pendapatan Daerah		834.587.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100persen			100 persen	1.698.798.675			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penyelenggaraan Pemerintahan Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	ASN Badan Pendapatan Daerah	100persen	1.881.453.300	
	5	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 Laporan			1 Laporan	7.400.000	- Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penyelenggaraan Pemerintahan Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	ASN Badan Pendapatan Daerah	1 Laporan	5.690.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan			12 Laporan	619.063.260	- Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penyelenggaraan Pemerintahan Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	ASN Badan Pendapatan Daerah	12 Laporan	800.000.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor															
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan			1 Laporan	1.072.335.415	- Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penyelenggaraan Pemerintahan Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	ASN Badan Pendapatan Daerah	1 Laporan	1.075.763.300	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipelihara	100persen			100 persen	493.580.880			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penyelenggaraan Pemerintahan Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	ASN Badan Pendapatan Daerah	100persen	349.764.000		
5	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan															
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	43 Unit			40 Unit	158.540.880	- Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penyelenggaraan Pemerintahan Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	ASN Badan Pendapatan Daerah	43 Unit	117.600.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit			45 Unit	75.650.000	- Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penyelenggaraan Pemerintahan Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	ASN Badan Pendapatan Daerah	47 Unit	53.868.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit			2 Unit	174.600.000	- Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penyelenggaraan Pemerintahan Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	ASN Badan Pendapatan Daerah	1 Unit	113.806.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5	02	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit			2 Unit	84.790.000	- Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penyelenggaraan Pemerintahan Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	ASN Badan Pendapatan Daerah	2 Unit	64.490.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
2	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Tingkat Pertumbuhan Pajak Daerah	4%		2 %	4.498.407.000						3%	3.491.219.000		

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
														Nasional					Daerah	
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	- Cakupan Penunjang Peningkatan Pajak dan Retribusi Daerah - Tingkat Pemenuhan Kepatuhan Wajib Pajak Daerah Terhadap Penyelesaian Piutang Pajak - Tingkat Pertumbuhan pajak Daerah jenis Official Assesment - Tingkat Pertumbuhan pajak Daerah Jenis Self Assesment	100 Persen 100 Persen 4 Persen 4 Persen			100 Persen 100 Persen 2 Persen 2 Persen	4.498.407.000			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penyelenggaraan Pemerintahan Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	Masyarakat Wajib Pajak	3Persen 100Persen 3Persen 100Persen	3.491.219.000	
	5	02	04	2.01	0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah														
						Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	3 Dokumen			1 Dokumen	55.240.000	- Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penyelenggaraan Pemerintahan Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	Masyarakat Wajib Pajak	1 Dokumen	45.522.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5	02	04	2.01	0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah														
						Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	3 Dokumen			1 Dokumen	406.417.000	- Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penyelenggaraan Pemerintahan Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	Masyarakat Wajib Pajak	1 Dokumen	336.653.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5	02	04	2.01	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah														

No	Kode					Usuran / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	6 Laporan				1 Laporan	316.417.000	- Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penyelenggaraan Pemerintahan Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	Masyarakat Wajib Pajak	2 Laporan	95.408.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	04	2.01	0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah															
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	3 Unit				1 Unit	265.000.000	- Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penyelenggaraan Pemerintahan Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	Masyarakat Wajib Pajak	1 Unit	208.646.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	04	2.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah															
						Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	36 Laporan				12 Laporan	277.235.000	- Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penyelenggaraan Pemerintahan Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	Masyarakat Wajib Pajak	12 Laporan	218.082.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	04	2.01	0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah															
						Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	3 Laporan				1 Laporan	57.610.000	- Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penyelenggaraan Pemerintahan Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	Masyarakat Wajib Pajak	1 Laporan	49.315.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	04	2.01	0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)															
						Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	33100 Obyek Pajak				10100 Obyek Pajak	559.999.850	- Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penyelenggaraan Pemerintahan Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	Masyarakat Wajib Pajak	11000 Obyek Pajak	515.926.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5	02	04	2.01	0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah														
						Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	488500 Dokumen			161500 Dokumen	671.000.000	- Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penyelenggaraan Pemerintahan Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	Masyarakat Wajib Pajak	163000 Dokumen	545.516.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5	02	04	2.01	0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah														
						Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	9600 Layanan			3100 Layanan	579.000.000	- Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penyelenggaraan Pemerintahan Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	Masyarakat Wajib Pajak	3200 Layanan	341.421.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5	02	04	2.01	0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah														
						Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	36 Dokumen			12 Dokumen	233.000.000	- Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penyelenggaraan Pemerintahan Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	Masyarakat Wajib Pajak	12 Dokumen	265.549.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5	02	04	2.01	0011	Penagihan Pajak Daerah														
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	111250 Dokumen			36550 Dokumen	175.266.100	- Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penyelenggaraan Pemerintahan Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	Masyarakat Wajib Pajak	37100 Dokumen	500.752.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5	02	04	2.01	0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	4780 Dokumen				1450 Dokumen	629.162.500	- Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penyelenggaraan Pemerintahan Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	Masyarakat Wajib Pajak	1600 Dokumen	102.426.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	04	2.01	0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah															
						Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	850 Dokumen				260 Dokumen	155.571.500	- Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penyelenggaraan Pemerintahan Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	Masyarakat Wajib Pajak	285 Dokumen	171.166.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	04	2.01	0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah															
						Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	6 Laporan				2 Laporan	65.365.050	- Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penyelenggaraan Pemerintahan Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	Masyarakat Wajib Pajak	2 Laporan	49.315.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	04	2.01	0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah															
						Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	3 Laporan				1 Laporan	52.123.000	- Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penyelenggaraan Pemerintahan Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	Masyarakat Wajib Pajak	1 Laporan	45.522.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
											J U M L A H	17.545.343.000							17.874.387.700	

BAB V

PENUTUP

Dengan tersusunnya Rancangan Akhir Rencana pembangunan tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang disebut Rencana Kerja (RENJA–PD) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dibuat untuk periode 1 (satu) tahun, disusun sebagai indikator dalam menentukan arah kebijakan tahunan kinerja program dan kegiatan yang bersifat mendesak dan penting untuk dilaksanakan serta realistis untuk dilaksanakan dan diselesaikan dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Diharapkan Rencana Kerja (RENJA–PD) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024 ini kiranya dapat direalisasikan, sehingga permasalahan operasional yang dihadapi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dapat teratasi.

Beberapa hal yang menjadi catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam rangka pelaksanaan Rencana Kerja Bapenda antara lain adalah :

1. Penyusunan Kerangka Acuan Kerja dan time Schedul dalam pelaksanaan kegiatan/Sub Kegiatan belum tersusun secara matang sehingga capaian Realisasi Kinerja, fisik maupun keuangan seringkali lambat, dan selalu memanfaatkan waktu-waktu akhir tahun.
2. Penempatan rekening belanja yang kurang tepat, sehingga sering kali menjadi hambatan pelaksanaan kegiatan karena harus menunggu adanya perubahan anggaran.

Kaedah-kaedah yang menjadi acuan dalam penyusunan renja-PD Badan Pendapatan Daerah adalah Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD dan RPJMD serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, bahwa rencana perangkat daerah terdiri dari rencana strategis (renstra) perangkat daerah, dan rencana kerja (renja) perangkat daerah. Disamping itu penyusunan Renja juga memperhatikan hasil Musrenbang baik tingkat Desa, Kecamatan maupun Kabupaten, serta adanya keselarasan dengan hasil Musrenbang Tingkat Propinsi.

Tahapan selanjutnya terhadap Renja yang telah disusun adalah dilakukan evaluasi pelaksanaan. Evaluasi dimaksud mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi serta pagu indikatif.

Adapun langkah-langkah yang akan diambil agar Renja bapenda ini dapat terlaksana secara baik dan target kinerja dapat tercapai secara maksimal antara lain adalah :

1. Penyusunan Kerangka Acuan Kerja secara matang dengan melakukan koordinasi yang baik dengan pihak-pihak terkait.
2. Penyusunan Time schedul dan pelaksanaan secara tepat waktu.
3. Identifikasi permasalahan-permasalahan di lapangan secara dini, agar dapat melakukan antisipasi lebih awal dan memperkecil resiko kegagalan mencapai target kinerja.

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan dalam Renja Perangkat daerah Tahun 2024 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir selain tergantung dari dukungan anggaran yang memadai, juga sangat tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan dan disiplin aparatur serta peran aktif masyarakat khususnya wajib pajak daerah, sehingga program dan kegiatan dapat memberikan hasil (*Outcome*) yakni meningkatnya pendapatan asli daerah khususnya pajak daerah yang akan berdampak pada meningkatnya anggaran pelaksanaan pembangunan diberbagai sektor di Kabupaten Indragiri Hilir.

Selanjutnya Rencana Kerja (Renja) ini dipakai sebagai pedoman untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKA-SKPD).

Tembilahan Juli 2023
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

FADILLAH, S.Pi. MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19691103 199803 1 005